

**CONSUMER PROTECTION AGAINST ELECTRICITY PRICE HIKES
A CASE STUDY ON PT. PLN (PERSERO) CITY OF GARUT
NETWORK SERVICE UNIT**

**(PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KENAIKAN
TARIF DASAR LISTRIK (TDL) STUDI KASUS PT. PLN (PERSERO)
UNIT PELAYANAN JARINGAN GARUT KOTA)**

Oleh : Tito Indratno
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
Instansi Asal : -
Pembimbing 1 : DR. Siti Ismijati Jenie S.H., C.N.
Pembimbing 2 : Roedjiono S.H., L.L.M.
Tanggal Wisuda : 25 April 2005

ABSTRACT

This research, which was on electricity consumers protection against electricity price hikes; a case study on PT. PLN (Persero) city of Garut network service unit, was a juridical-normative study, it aimed at discovering whether the rights of electricity consumers were protected, something that PT. PLN(Persero) should have provided, especially after it raised the electricity prices, which should have impacted on its service to its customers.

The secondary data that the researcher sought was taken from documents obtained during library research. Meanwhile, primary data was obtained from field study and interviews with informants and respondents. The collected data then went through a descriptive-qualitative analysis. The data from library research was compared to the one from field study.

It was discovered that the right of electricity consumers of PT. PLN (Persero) city of Garut network service unit were insufficiently protected. The conclusion came from the fact that there were only three out of thirteen point of TMP (standart of service) issued by the board of PT. PLN (Persero), as state in their decision number 081.K/010/DIR/2002, article 1, subsection (1), that consumers could use to claim compensations for losses they maight suffer. The board's decision was a reflection of a Presidential Decree number 89, year 2002, article 3, subsection (2) and a Ministerial Decree number 1836.K/36/MAN/2002, article 6, subsection (6). Consumers were left out in the mechanism for deciding on the declaration unit and TMP. Moreover most consumers of PT. PLN (Persero) city of Garut networkservice unit were unaware of the declaration unit and the functions of TMP it self.

article 3, subsection (2)

Key Word : Consumer Protection, Electricity Consumers and Electricity Price Hikes

**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KENAIKAN
TARIF DASAR LISTRIK (TDL) STUDI KASUS PT. PLN (PERSERO)
UNIT PELAYANAN JARINGAN GARUT KOTA**

**CONSUMER PROTECTION AGAINST ELECTRICITY PRICE HIKES
A CASE STUDY ON PT. PLN (PERSERO) CITY OF GARUT
NETWORK SERVICE UNIT**

Oleh : Tito Indratno
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
Instansi Asal : -
Pembimbing 1 : DR. Siti Ismijati Jenie S.H., C.N.
Pembimbing 2 : Roedjiono S.H., L.L.M.
Tanggal Wisuda : 25 April 2005

INTISARI

Penelitian mengenai Perlindungan Bagi Konsumen Pelanggan Listrik Terhadap Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Studi Kasus PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Garut Kota, merupakan penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen bagi pelanggan listrik yang seharusnya diberikan oleh PT. PLN (Persero) dengan adanya kenaikan Taris Dasar Listrik (TDL) dilihat dari segi pelayanan terhadap pelanggan.

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi dokumen. Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara yang didapat dari narasumber dan responden. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Bahwa perlindungan konsumen dalam hal ini pelanggan listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota dapat dikatakan masih lemah. Hal tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 081.K/010/DIR/2002 pasal 1 ayat (1) merinci 13 (tiga belas) point Indikator TMP, ternyata hanya 3 (tiga) point Indikator saja yang dapat dijadikan dasar pemberian ganti rugi bagi konsumen, hal tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2002 pasal 3 ayat (2) dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1836 K/36/MEN/2002 pasal 6 ayat (3). Mekanisme pembentukan TMP dalam menentukan satuan deklarasi tidak melibatkan unsur pelanggan dan sebagian besar pelanggan listrik PT. PLN (Persero) UPJ Garut Kota tidak memahami satuan angka deklarasi dan fungsi TMP itu sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelanggan Listrik dan Kenaikan TDL